

DAFTAR PUSTAKA

A. Literatur Buku

- Ambar Teguh , 2004, *Kemitraan dan Model-Model Pemberdayaan*.
Yogyakarta : Graha Ilmu
- Chatarina Rusmiyati. (2011). *Pemberdayaan Remaja Putus Sekolah*.
Yogyakarta: B2P3KS
- Ife. 1995, *Pemberdayaan Yang Memuat Dua Pengertian Kunci, Yakni
Kekuasaan dan Kelompok Lemah*.
- Jones, Charles O. 1996. *Pengantar Kebijakan Publik (Public Policy*.
- Meniarneo eko (2010), *Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dibagi Menjadi Lima
Bentuk*.
- Pranarka. A.M.W., dan Prijono, 1996, *Pemberdayaan: Konsep, Kebijakan dan
Implementasi*. diedit oleh: Onny S.P. dan Pranarka. Jakarta.
- Pranarka.A.W.M .dan Vidhyandika (1996), *Strategi Pemberdayaan
Masyarakat*. Jakarta.
- Satjipto Rahardjo. Tanpa tahun. *Masalah Penegakan Hukum suatu Tinjauan
Sosiologis*. Bandung: Sinar Baru.
- Sementara Shardlow. 1998, *Pemberdayaan Membahas Bagaimana Individu,
Kelompok Ataupun Komunitas Berusaha Mengontrol Kehidupan Mereka
sendiri Dan Mengusahakan Untuk Membentuk Masa Depan Sesuai Dengan
Keinginan Mereka*.
- Setiono. 2004. *Hukum dan Kebijakan Publik*. Surakarta : Bahan Kuliah
Pascasarjana UNS.
- Silalahi, Karlinda dan Meinarno, Eko A. 2010. *Keluarga Indonesia*. Jakarta ;PT
Raja Grafindo.
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Ui Press. Jakarta, 1984, hlm
133
- Suharto, Edi dan Freddy, Anton 2007. *Kekerasan Terhadap Anak*. Bandung :
Nuansa Cendika
- Suharto, Edi. 2014. *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*.
Bandung:PT Refika Aditama.
- Sulistiyani, 2004, *Kemitraan dan Model-Model Pemberdayaan*.

Yogyakarta : Graha Ilmu

Totok dan Poerwoko. (2012). *Pemberdayaan Masyarakat dalam Prespektif Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta

Winarni, Tri 1998, *Memahami Pemberdayaan Masyarakat Desa Partisipatif dalam Orientasi Pembangunan Masyarakat Desa Menyongsong Abad 21: Menuju Pemberdayaan Pelayanan Masyarakat*, Aditya Media, Yogyakarta.

Wasistiono, Sadu. 1998:46. *Pemberdayaan Masyarakat* .Bandung: Mekar Rahayu.

B. Dokumen-dokumen

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 *tentang Pengesahan Konvensi mengenai Penghapusan segala bentuk Diskriminasi terhadap Wanita (Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women)*.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 *tentang Hak Asasi Manusia*.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 *tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*.

Peraturan Bupati Majalengka Nomor 260/Kep.58/DP3AKB/2017 *tentang Pembentukan Satuan Tugas Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Tingkat Desa/Kelurahan di Kabupaten Majalengka Tahun 2017*

DP3AKB (2017). *Prosedur Standar Operasional Satuan Tugas Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)*. Majalengka

C. Rujukan Elektronik

<http://www.pikiran-rakyat.com/jawa-barat/2018/10/31/laporan-khusus-memaknai-majalengka-sebagai-lambung-tki-432456>

<http://p2tp2a.majalengkakab.go.id/>

<http://repositiory.fisip-untirta.ac.id>.

